

***“Pola Relasi Eksekutif Dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah”
(Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan 2015)***

Diajukan kepada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar dalam
Magister Ilmu Pemerintahan

Tesis

**Pembimbing
Dr. Suranto.,M.Pol**



OLEH:
MARNO WANCE
20141040031

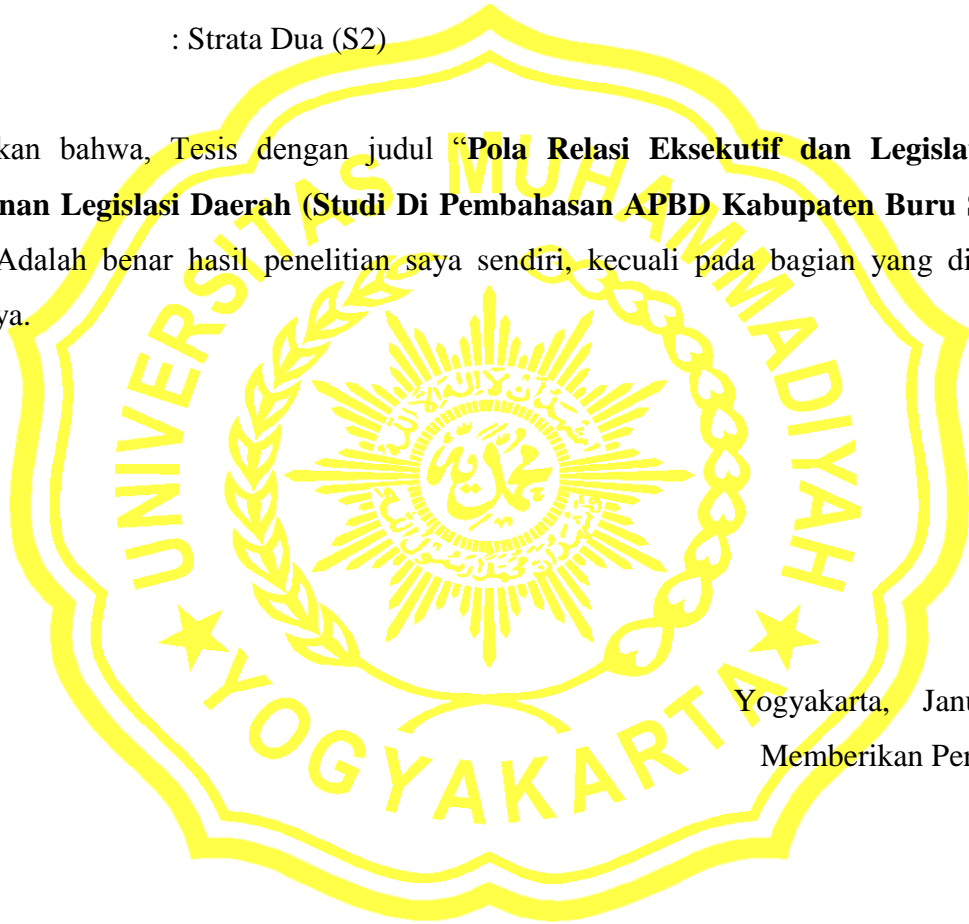
**MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
TAHUN 2016**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Marno Wance
NPM : 20141040031
Jenjang : Strata Dua (S2)

Menyatakan bahwa, Tesis dengan judul **“Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatann 2015)”**. Adalah benar hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian yang disebutkan sumbernya.



Yogyakarta, Januari 2017
Memberikan Pernyataan

Marno Wance
20141040031

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**POLA RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PENYUSUNAN LEGISLASI
DAERAH (STUDI DI PEMBAHASAN APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015)**

TESIS

Diajukan oleh:

Nama : Marno Wance

NPM :20141040031

Telah Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr.Suranto.,M.Pol

Yogyakarta, Januari 2017

Mengetahui

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Dr. Dyah Mutiarin., M.Si
NIK:19711108201004 163 089**

PENGESAHAN PROGRAM STUDI

Judul : POLA RELASI EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF PADA PROSES
PENYUSUNAN LEGISLASI DAERAH (STUDI DI PEMBAHASAN
APBD KABUPATEN BURU SELATAN 2015).

Ditulis oleh : Marno Wance

NPM : 20141040031

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar dalam Magister Ilmu
Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Yogyakarta, Januari 2017



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah Mutiarin., M.Si
NIK:19711108201004 163 089

LEMBARAN PENGESAHAN REVISI

Telah melaksanakan Ujian Tesis pada hari Senin, 26 Desember 2016, Pukul 10.00-11.00 WIB, Bertempat di lantai 1, Ruangan Tutorial Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk dapat diberikan persetujuan Pengesahan Revisi oleh:

Nama : Marno Wance
NPM : 20141040031
Judul Tesis : **Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015).**
Pembimbing : Dr. Suranto., M.Pol (.....)
Penguji I : Dra. Atik Septi Winarsih.,M.Si (.....)
Penguji II : Dr. Dyah Mutiarin.,M.Si (.....)

Yogyakarta, Januari 2017

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Dyah Mutiarin., M.Si
NIK:19711108201004 163 089

PERSEMBAHAN

Tesis ini Didikasikan Untuk:

ALLAH SWT, Berkat karunia-Nya berupa kesehatan akal sehat dan fikiran, jasmani dan rohani sehingga peneliti mampu untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Sembah sujud Ananda kepada kedua orang tua penulis yaitu La Dima Wance dan Wa Agu La Saleh , “*Madrasah pertama*’ yang telah mendidik dan mengajarkan *a, b, c, d*, sehingga saya bisa menjadi manusia yang selalu *Berfastabiqul khairat*. Serta ka Marton Wance, Ka Marlina, ka Anwar Loilatu (Almarhum), Ka Sulistiawati, adik-adikQu, Ponakan-ponakan, yang begitu besar memberikan sumbangsih baik moril maupun materil dalam penyusunan Tesis ini.

Kepada PapaQu La Djia Sanangka, MamaQu Nur Aisa, yang telah mendidik dan menasehati saya selama penulis masih pelajar, dengan melewati hari-hari susah maupun senang, selalu sabar dan istikomah, terima kasih atas semuanya.

MOTTO HIDUP

Intelektual, Humanis, Relejiutas
Sebab!!!

Menjadi Seorang Insan Akademisi yang Ideal dalam sebuah Organisasi harus Terpatri di dalam diri Tri Kompetensi Dasar karena dengan sendiri akan lahir suatu Kesadaran kritis untuk membangun bangsa yang negarawan.

Muhammadiyah hari ini berbeda dengan Muhammadiyah yang akan datang. Maka teruslah bersekolah menuntut Ilmu pengetahuan, jadilah Dokter, Insinyur, hakim dan sebagainya. Kemudian kembalilah ke Muhammadiyah.

Aku titipkan Muhammadiyah kepadamu dengan harapan agar Muhammadiyah dapat dipelihara dan dijaga dengan sungguh-sungguh (K.H Ahmad Dahlan)

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis sebagai Penelitian Akhir Studi dengan judul "*Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif Pada Penyusunan Legislasi Daerah (Studi Di Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015)*" sebagai Prasyarat untuk mencapai gelar S2 MIP Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).

Melalui Tesis ini, penulis banyak belajar mengenai Relasi Elit, Penyusunan APBD, Pertarungan Kepentingan Eksekutif dan Legislatif, serta fenomena Pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015. Dalam kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Cipto, Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selaku Guru yang selalu memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi pada Program Pascasarjana S2 Magister Ilmu Pemerintahan UMY.
2. Bapak Dr. Achmad Nurmandi., M.Sc selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Dan Guru Pengasuh Mata Kuliah Politik Pemerintah di MIP 09 Tahun 2014 yang telah memberikan motivasi dan semangat untuk selalu memperoleh literatur terbaru.
3. Dr. Dyah Mutiarin., M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah meberikan kesempatan untuk menimbah ilmu di MIP UMY, selalu memberikan masukan konstruktif untuk memperbaiki hidup dan kehidupan dan sebagai ibu yang telah memberikan banyak wahana keilmuan baru yang belum pernah terfikirkan, terima kasih ibu telah

memberikan banyak pemahaman keilmuan pada mata kuliah Manajemen Keuangan Publik.

4. Bapak Dr. Suranto., M.Pol Selaku Dosen Pembimbing yang selalu sabar, teleti, memberikan masukan untuk perbaikan Materi Tesis untuk lebih baik lagi, terima kasih walaupun di tengah kesibukan masih sempat memberikan motivasi dan semangat untuk dapat secepatnya menyelesaikan Studi di S2 MIP UMY.
5. Bapak Dr. Zuly Qodir yang telah memerikan banyak tentang Cara menulis Tesis yang baik dan benar sehingga membantu penulis untuk menuangkan ide-ide yang ada.
6. Bapak Paryanto meluangkan waktunya bagi penulis untuk berkonsultasi dan mempelajari banyak hal dalam penulisan tesis ini, Tak Lupa Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ayatullah Hadi selaku senior sekaligus teman diskusi yang telah banyak memberikan Pandangan dan motivasi selama Penulis mengenyam pendidikan di S2 MIP UMY
7. Seluruh dosen dan karyawan Program S2 Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UMY yang telah melayani dengan dengan penuh tanggung jawab.
8. Bapak Hi. Naim Laoilatu, S.Ag., M.M Kepala Badan Kesbanpol dan Linmas Kabupaten Buru Selatan, atas segala bantuannya selama peneliti berada di lokasi penelitian.
9. Selaku senior di IMM Ternate dan juga saya jadikan sebagai “Mentor” dalam diskusi serta memberikan pandangan politik kontemporer sekarang yaitu kanda Aji Deni (Mahasiswa S3 Politik Islam UMY) terima kasih atas masukan dan motivasinya.
10. Bapak Asnawi Yunus, S.Sos, Sekretaris Camat Kota Ternate Tengah, atas Informasi serta data yang peneliti Butuhkan selama berada di lokasi penelitian.

11. Bapak Hadi Longa, SE selaku Sekretaris DPRD Kabupaten Buru Selatan yang selalu mendampingi peneliti selama di lokasi dan memberikan data-data pendukung yang di butuhkan dalam peneltian ini.
12. Kepada Keluarga Besar Laskar Merah PK IMM Fisip UMMU Rumah Intelektual pertama sebagai wadah Pencarian Jati diri, Berdiskusi, bersandara gurau, dan Beramal Ma'ruf Nahi Mungkar.
13. Kepada seluruh Sahabatku Kontrakan "*Tuna Asmara*" Akbar Ismail (Ternate), Amrin Nafar (Ternate), Idham Dominggus (Ternate), Andi Nuramahdi (Malang), Suhendri (Jambi), Arip Suprianto (Batam), yang menemani dan menjalani kehidupan yang keras di tanah rantau begitu keras baik suka maupun duka selalu kompak sampai selesai studi di Jogjakarta, terima kasih sudah banyak memberikan penulis dorongan dan semangat untuk menyelesaikan penyusunan Tesis ini.
14. Kepada Sahabat Karibku Bung Sahdi Syahri Buamona, Ariyanto Umarama, Bung Eko Buamona, dan yang lain-lain yang tak dapat penulis sebutkan satupersatu, Di Sela-sela kesibukan namun masih menyisikan waktu untuk berdiskusi, Memberikan dorongan dan motovasi sehingga penyusunan tesis ini dapat di selesaikan.
15. Kepada Sahabatku Mahasiswa S2 Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) UMY Angkatan 06 Bung Samau Hi Laha yang selalu membimbing dan menjadi teman diskusi selama penulis memulai Studi Awal di Jogjakarta, Terima Kasih Bung Mustama MIP UMY 08 yang selalu memberikan motivai, semangat dan selalu menemani penulis untuk memulai menulis rancangan awal Proposal tesis awal.
16. Sahabat karpku Herizal (Mahasiswa asal Aceh) yang selalu menemani dan memberikan motivasi untuk selalu semangat, Sahabat Karibku Ulfatun Akbar (Mahasiwa asal NTB) yang selalu setia menjadi teman diskusi yang baik dan selalu memberikan semangat, dan teman-teman S2 Magister Ilmu Pemerintahan (MIP)

UMY Angkatan 09 2014, Bung Khairul, Bung Andi Nurahmadi, Bung Zaki, Bung Andi Nurfiqih, Putri Sityaningrum, Bung Tawakal Baharudin, Bung Mickhael Lega, Bung Iwan Cahli, dll yang selalu melewati waktu selama di kelas maupun di ruangan publik lainnya. Teman yang selalu menasehati dan memberikan motivasi ketika penulis dalam penyusunan Tesis ini.

17. Kepada teman-teman diskusi lintas angkatan, bang Mansur Djamal (MIP 11), Bung Herman Lawelai (MIP 11), Kawan Sofyan Muhammad (MIP 11), serta ada asli ternate yang di mutasi ke jayapura yaitu Bung Satrio (MIP 1), yang selalu menemani penulis hampir menghabiskan waktu untuk selalu diskusi dan saling memotivasi, menceritakan bagaimana membangun relasi antara sektor setelah pasca selesaikan studi S2 MIP, Terima kasih semua atas semuanya.

Penulis juga Menyadari bahwa di dalam penyusunan Tesis ini masih banyak kekurangan di dalamnya, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis sebagai manusia biasa yang tak luput dari kekhilafan. Olehnya itu saran dan kritik untuk kelengkapan proses penyempurnaan Tesis ini.

Akhirnya semoga Allah SWT, senantiasa selalu membuka pintu rahmat buat kita semua.

Amin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	iv
Abstrak.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang Masalah	1
I.2 Rumusan Masalah	28
I.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	29
BAB II TINJAUAN TEORI	32
II.1 Kajian Pustaka	32
II.2 Kerangka Teori	44
II.3 Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif.....	44
II.3.1 Teori Pola Relasi	44
II.3.2 Model Relasi	48
II.3.2.1 Model Gillin dan Gillin.....	48
II.3.2.2 Model Stone	62
II.3.2.3 Model Wayne Parson	65
II.3.2.4 Model Interaksi Asosiatif	66
II.3.2.5 Model Interaksi Disosiatif.....	69
II.4 Proses Pembuatan Legislasi	76
II.4.1 Pengertian Legislasi	78
II.5 Teori Hubungan Keagenaan Antara Eksekutif dan Legislatif	78
II.6 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Proses Pembuatan Legislasi Pada Pembahasan APBD	82
II.7 Pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	87
II.7.1 Konsep Anggaran.....	87
II.7.2 Fungsi Anggaran Publik.....	90
II.7.3 Karakteristik Anggaran Publik.....	93
II.7.4 Tahapan-tahapan Dalam Siklus Anggaran.....	94
II.8 Pengertian Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	97
II.9 Kerangka Fikir	103
II.10 Definisi Konsepsional	104
II.II Definisi Operasional.....	106

BAB III METODE PENELITIAN	113
III.1 Jenis Penelitian	113
III.2 Lokasi Penelitian	115
III. 3 Subjek dan Objek Penelitian.....	117
III.4 Unit Analisis Data.....	118
III.5 Jenis Data	118
III.5.1 Data Primer	121
III.5.2 Data Sekunder.....	121
III.6 Teknik Pengumpulan Data	122
1. Wawancara	123
2. Dokumentasi	124
III.7 Teknik Analisis Data	125
1. Reduksi Data.....	127
2. Penyajian Data.....	127
3. Penarikan Kesimpulan.....	128
BAB IV Deskripsi Objek Penelitian.....	129
IV.I Gambaran Umum Kondisi Daerah	129
1. Aspek Geografis.....	129
2. Aspek Demokrafis.....	131
IV.2 Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.....	133
1. Pendapatan Asli Daerah	136
2. Dana Perimbangan	136
3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	137
IV.2 Anggaran Belanja Daerah.....	400
IV.3 Struktur APBD.....	103
IV.4 Siklus APBD.....	104
IV.5 Proses Penyusunan.....	108
V.I Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	500
V.I Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif.....	500
V.2 Interaksi Pada proses Pembahasan KUA-PPAS	529
1. Proses Penyusunan RKA-SKPD.....	529
2. Tahapan Penyusunan KUA-PPAS	532
V.2.1 Pola Relasi <i>Decesional</i> Asosiatif	571
V.2.2 Pola <i>Anticipated Reaction</i> Asosiatif	593
V.2.4 Pola Interaksi <i>Non decisional</i> Asosiatif	619
V.2.4 Pola Interaksi <i>Sistemic</i> Asosiatif.....	622

V.3 Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pembahasan APBD.....	147
V.5 Faktor-faktor Pola Relasi Pada Pembahasan APBD	651
1. Faktor <i>Interest</i> (Kepentingan).....	651
2. Faktor Ideologi.....	664
3. Faktor Peraturan.....	666
V.5 Faktor <i>Capacity</i> (Kemampuan).....	667
1. <i>Personal Background</i>	668
2. <i>Political background</i>	681
VI. Kesimpulan Dan Saran	
a. Kesimpulan	700
DAFTAR PUSTAKA	707

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Hasil pemilu DPRD Kabupaten Buru Selatan, 14
Tabel 1.2	: Penetapan APBD Kabupaten Buru Selatan, 18
Tabel 2.3	: Tinjauan Pustaka, 40
Tabel 2.2	: Paradigma Interaksi, 50
Tabel 2.3	: Matriks Pola Relasi Elit Pada pembahasan APBD, 109
Tabel 2.4	: Matrisk Faktor Penyebab Pembahasan APBD, 111
Tabel 3.1	: Unit Analisis Data, 118
Tabel 3.2	: Data Primer, 120
Tabel 3.3	: Data Sekunder, 121
Tabel 4.1	: Jumlah Kecamatan, Ibukota Kecamatan, Luas, Desa dan Dusun, 132
Tabel 4.2	: Peta Kabupaten Buru Selatan, 131
Tabel 4.3	: Jumlah Penduduk Kabupaten Buru Selatan, 92
Tabel 4.4	: Rencana Pendapatan Daerah Kabupaten Buru Selatan Tahun Anggaran, 138
Tabel 4.5	: Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan, 404
Tabel 4.6	: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD), 406
Tabel 4.7	: Proporsi Belanja Tidak Langsung, 407
Tabel 4.8	: Belanja Langsung, 408
Tabel 4.9	: Siklus Perencanaan APBD, 405
Tabel 4.10	: Skema Penyusunan APBD, 418
Tabel 4.11	: Proses Penyusunan APBD, 422
Tabel 5.1	: Penyusunan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan Anggaran 2015, 508
Tabel 5.2	: Perbandingan PAD di KUA –PPAS dan RAPBD Buru Selatan 2015, 514
Tabel 5.3	: Perbandingan Belanja di KUA-PPAS dan RAPBD Buru Selatan 2015, 502
Tabel 5.4	: Pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Buru Selatan, 528
Tabel 5.5	: Pengesahan RKPd Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, 531
Tabel 5.6	: KUA-PPAS Buru Selatan Berdasarkan Urusan Pemerintah, 533
Tabel 5.7	: Perbandingan Rancangan Estimasi Pendapatan Daerah di KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan, 549
Tabel 5.8	: Perbandingan Rancangan Pendapatan Daerah di KUA-PPAS Buru Selatan, 552
Tabel 5.9	: Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan, 558
Tabel 5.10	: Rancangan Belanja Daerah, 567
Tabel 5.11	: PPAS Buru Selatan berdasarkan Program Kerja, 575
Tabel 5.12	: Rincian PPAS Pembiayaan, 580
Tabel 5.13	: Nota Kesepakatan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan, 581
Tabel 5.14	: PPAS Per SKPD Buru Selatan, 584
Tabel 5.15	: Penyampaian RAPBD Ke DPRD Kabupaten Buru Selatan, 613
Tabel 5.16	: Pola Relasi Pemetaan Pemangku Kepentingan Eksekutif dan Legislatif, 629

- Tabel 5.17 : Keputusan DPRD tentang Persetujuan atas Ranperda tentang APBD, 635
- Tabel 5.18 : Interaksi Pemerintah Kabupaten Buru Selatan dan DPRD Tahun Anggaran APBD 2015, 643
- Tabel 5.19 : Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrembang Se-Kecamatan Buru Selatan Tahun 2014, 656
- Tabel 5.20 : Usulan Aspirasi Masyarakat di Musrembang Se-Kecamatan Buru Selatan Tahun 2015, 657
- Tabel 5.21 : Keterlambatan Penetapan Anggaran APBD Kabupaten Buru Selatan, 667
- Tabel 5.22 : Komposisi Anggota DPRD Buru Selatan menurut Tingkat Pendidikan, 678
- Tabel 5.23 : Bidang Pendidikan, 680
- Tabel 6.24 : Aktivitas Politik, 682

Daftar Grafik

- Grafik 5.1 : KUA-PPAS Buru Selatan Berdasarkan Urusan Pemerintah 2015, 536
- Grafik 5.2 : Persentase Jumlah Anggaran KUA-PPAS Per Dinas Kabupaten Buru Selatan, 537
- Grafik 5.3 : Jumlah Anggaran KUA-PPAS Per Badan/Kantor 2015, 538
- Grafik 5.4 : Jumlah Anggaran KUA-PPAS Bagian Pemerintahan Umum, 539
- Grafik 5.5 : Perbandingan Rancangan Pendapatan Daerah di KUA-PPAS Buru Selatan 2015, 551
- Grafik 5.6 : Rancangan Belanja Daerah Kabupaten Buru Selatan 2015,559
- Grafik 5.7 : Rancangan Belanja Daerah pada KUA-PPAS di Kabupaten Buru Selatan, 561
- Grafik 5.8 : Perbandingan KUA-PPAS dan RAPBD, 585

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 : Tipologi Pola Relasi *Informal Institutional*, 73
- Gambar 2.2 : Kerangka Pikir, 103
- Gambar 2.3 : Pola Hubungan Eksekutif dan Legislatif Pada Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Buru Selatan, 624
- Gambar 2.4 : Peta Kabupaten Buru Selatan, 90
- Gambar 2.5 : Pola Relasi Pemerintah Kabupaten dan DPRD pada Pembahasan Rancangan APBD Tahun 2015, 640
- Gambar 2.6 : Pola Relasi Aktor dalam pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015 pada Proses KUA-PPAS, 644
- Gambar 2.7 : Pola Relasi Aktor Pada Pembahasan RAPBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015, 645

Daftar Singkatan

APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
BANGGAR	: Badan Anggaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
PDI-P	: Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
PAN	: Partai Amanat Nasional
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
RAPBD	: Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
Mendagri	: Menteri Dalam Negeri
AKD	: Alat Kelengkapan Dewan
TATIB	: Tata Tertib
PAD	: Pendapatan Asli Daerah
DAU	: Dana Alokasi Khusus
TPAD	: Tim Panitia Anggaran Daerah
KUA	: Kebijakan Umum Anggaran
PPAS	: Prioritas dan Platfom Anggaran Sementara
PPA	: Prioritas dan Platfom Anggaran
DAK	: Dana Alokasi Khusus
RENJA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pembangunan Daerah
RPJP	: Rencana Kerja Jangka Panjang
RPJM	: Rencana Kerja Jangka Menengah
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah

INTISARI

Pembahasan APBD merupakan proses yang sangat kompleks. Hal ini nampak meski telah ada aturan yang mengatur tentang mekanisme pembahasan anggaran namun tetap saja di dalamnya sarat dengan pola relasi kepentingan para elit Eksekutif dan Legislatif. Dengan adanya aturan hukum tentang mekanisme pembahasan perda APBD maka yang terjadi ialah pola relasi elit yang relatif demokratis dan transparansi sehingga melahirkan anggaran yang aspiratif. Faktanya, banyak terbit APBD Kabupaten Buru Selatan yang bermasalah (tidak tepat waktu) yaitu dari tahun pembahasan 2010 sampai 2015 selalu terjadi tarik ulur kepentingan yang mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD. Oleh karena menjadi penting untuk dilakukan studi tentang (1) pola relasi Eksekutif dan Legislatif pada proses pembuatan APBD Kabupaten Buru Selatan. (2) Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Pola Relasi Eksekutif dan Legislatif pada pembahasan APBD Kabupaten Buru Selatan Tahun 2015.

Untuk menjawab permasalahan tersebut maka harus dilakukan analisis secara komprehensif untuk menemukan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif. Studi deskriptif kualitatif ini berfungsi untuk menjelaskan dan membaca pola relasi antara eksekutif dan legislatif dalam melakukan tahapan-tahapan pembahasan APBD. Teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan menggunakan bahan-bahan yang terkait. Pendekatan yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen tertulis, arsip maupun yang lainnya pada instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penelitian. Dalam menentukan hasil penelitian tentang pola relasi yang terjadi maka menggunakan teori pola interaksi dalam kekuasaan model Stone yang yaitu Model interaksi *Decisional*, model interaksi *Anticipated Reaction*, Interaksi *Nondecisional Making*, Interaksi *Systemic*. Dan teori model ROCCIPI (*Rule, Capacity, Communication, interest, process, ideologi*).

Berdasarkan Deskripsi temuan hasil penelitian dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pola relasi Eksekutif dan Legislatif pada Pembahasan APBD Tahun 2015 sebagai berikut: *Pertama*, ditemukan tiga pola interaksi eksekutif dan legislatif yaitu akomodasi, dominasi, dan kompromi namun di antara ketiga pola interaksi dari keseluruhan pembahasan kebijakan anggaran ditemukan adanya proses pola yang lebih mendominasi. *Kedua*, Pola Interaksi *Decisional* yaitu Pola pertentangan yang berlangsung pada perumusan (KUA) dan (PPAS) sehingga mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD, pola interaksi kekuasaan yang terjadi tawar menawar (*bargaining*) untuk melakukan pertukaran kepentingan legislatif kepada Eksekutif yang tidak diakomodir Pada (RKA) SKPD. *Ketiga*, pola interaksi *Anticipated Reaction* yaitu Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menerima kepentingan DPRD yang menjadi rekomendasi Reses untuk menjaga kestabilan pembahasan APBD Tahun 2015. *Keempat*, Pola interaksi *Non Decisional* yaitu pihak legislatif menolak melakukan pembahasan KUA dan PPAS karena dari pihak eksekutif tidak menyerahkan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masing-masing SKPD. Sedangkan Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Relasi eksekutif dan legislatif pada pembahasan APBD Tahun 2015 yaitu *Personal Background* dan *political Background*.

Kata Kunci: Relasi Eksekutif-Legislatif, Legislasi Daerah, Proses Legislasi

ESSENCE

Discussion of budget is a very complex process. It seems despite adan rules governing mechanism of the budget discussion, but still in it loaded with a pattern of relations interests of the elite executive branch and the Legislature. With the rule of law on the mechanism of regulation discussion of the budget then there is the relationship patterns of elite relatively democratic and transparency that gave birth aspirational budget. In fact, many South Buru district budget issue is problematic (mistimed), namely from the year 2010 to 2015 discussions always happen tug of interests that result in a delay of APBD. by therefore be important to do a study on (1) the pattern of the executive and legislative relations in the process of making South Buru district budget. (2) What factors are affecting the Executive and Legislative Relationship Patterns on the discussion of South Buru district budget in 2015.

To answer these problems then it should do a comprehensive analysis to find facts on the ground. So that the method used in this research is descriptive qualitative. This qualitative descriptive study serves to explain and read the pattern of relationship between the executive and the legislature in making the stages of budget discussions. Data collection techniques used there were a few of observation, interviews, documentation and use materials related. The approach used is primary and secondary data. The primary data source is the source of data obtained directly from the respondent or the object under study, while the secondary data source is the source of the data obtained through written documents, archives or any other agency or institution related research. In determining the results of research on the relationship pattern that happens then using the theory of interaction patterns in the power of the stone models, namely Model decisional interaction, interaction models Anticipated Reaction, Making Nondecisional Interactions, Interactions Sytemic. And theoretical models ROCCIPI (Rule, Capacity, Communications, interest, process, ideology).

Based on the description research findings and analysis is concluded that the patterns of relationship the Executive and the Legislature on the discussion of the budget in 2015 as follows: *Firstly*, there were three patterns of interaction of the executive and legislative branches, namely akomondasi, domination, and compromise but among three interaction patterns of the overall policy discussion found their budget process that is more dominating pattern. *Secondly*, the pattern of interaction Decision of disagreement that took place in the formulation (KUA) and (PPAS) resulting late determination of the budget, the pattern of the interaction of power that occurred bargaining to exchange the legislature's interest to the executive who are not accommodated On (RKA) SKPD. *Thirdly*, patterns of interaction Anticipated Reaction of South Buru District Government receives the benefit of parliament who form the recess recommendation to maintain the stability of the Year 2015. *Fourthly*, discussion of budget, non-decisional interaction pattern that the legislature refuses to KUA and PPAS discussion because of the executive did not submit documents Plans Work Budget (RKA) from each SKPD. While factors influencing ang Relationship Patterns executive and legislative discussion of budget 2015 namely Personal Background and political Background.

Keywords: Executive-Legislative Relations, Process Legislation, Regional Legislation

